



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAPORAN MONITORING MANAJEMEN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2021**

NOMOR : LGIAT-83/P3A/VIII/2021

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8670360-2 Faksimile (031) 8670911 e-mail: jatim@bpkp.go.id

Nomor : LGIAT-83/P3A/VII/2021
Lampiran : 4 Lampiran
Hal : Laporan Monitoring Manajemen Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
sampai dengan Bulan Juni 2021

3 Agustus 2021

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
di Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring Manajemen Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sampai dengan Bulan Juni 2021 sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: ST-685/PW13/6/2021 tanggal 7 Juli 2021.

2. Tujuan Penugasan

Tujuan monitoring kinerja yaitu mengetahui perkembangan kinerja perwakilan dan melaporkan realisasi capaian *outcome* dan *output* kegiatan dan realisasi keuangan yang telah dilaksanakan serta monitoring Rencana Aksi.

3. Tempat dan Waktu Penugasan

Penugasan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

4. Pelaksanaan dan Hasil Penugasan

- a. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja
Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur atas 6 (enam) sasaran program menunjukkan bahwa 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja

program (86,05%) telah mencapai/melampaui target dan 6 (enam) indikator kinerja (13,95%) belum mencapai target.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran program dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sasaran Program 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.

a) IKK 1.1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

IKK Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi diukur dengan nilai rupiah penetapan kurang bayar atas optimalisasi PAD berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sebesar Rp904.000.000,00, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar Rp904.000.000,00. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp997.000.000,00.

Dengan demikian capaian IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi" sebesar 110,26% dari target sampai dengan triwulan II dan target Tahun 2021 sebesar Rp904.000.000,00.

b) IKK 1.2: Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi

IKK Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi diukur dengan nilai potensi penerimaan daerah yang tidak dihitung dalam penetapan pajak/retribusi daerah berdasarkan audit/evaluasi Pengujian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021. Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sebesar Rp1.506.000.000,00, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.506.000.000,00. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.574.000.000,00.

Dengan demikian capaian IKK "Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi" sebesar 237,34% dari target sampai dengan triwulan II dan target Tahun 2021 sebesar Rp1.506.000.000,00.

c) IKK 1.3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah diukur dari nilai anggaran/rencana belanja yang yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif yaitu dari hasil audit

penyesuaian harga (eskalasi) dan hasil audit klaim 1. Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sebesar Rp188.130.000.000,00, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.702.000.000,00. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp358.827.000.000,00.

Dengan demikian capaian IKK "Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah" sebesar 13.280,05% dari target sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.702.000.000,00 dan sebesar 190,73% dari target Tahun 2021 sebesar Rp188.130.000.000,00.

d) IKK 1.4: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

IKK Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah diukur berdasarkan nilai belanja yang dapat dikembalikan ke kas negara dan daerah termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan berdasarkan hasil audit investigasi dan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sebesar Rp40.679.000.000,00, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar Rp20.340.000.000,00. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp38.155.000.000,00.

Dengan demikian capaian IKK "Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah" sebesar 187,59% dari target sampai dengan triwulan II sebesar Rp20.340.000.000,00 dan sebesar 93,80% dari target Tahun 2021 sebesar Rp40.679.000.000,00.

e) IKK 1.4: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

IKK Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer diukur berdasarkan nilai belanja yang dapat dikembalikan ke kas negara dan daerah yang berasal dari dana transfer termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan berdasarkan hasil audit investigasi dan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sama dengan target sampai dengan triwulan II sebesar Rp118.000.000,00. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp4.000.000,00.

Dengan demikian capaian IKK "Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer" sebesar 3,12% dari target sampai dengan triwulan II sebesar dan target Tahun 2021 sebesar sebesar Rp118.000.000,00.

f) IKK 1.4: Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

IKK Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah diukur berdasarkan nilai pembiayaan daerah yang bisa diselamatkan berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sebesar Rp59.000.000,00, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp91.000.000,00.

Dengan demikian capaian IKK "Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah" sebesar tak terhingga dari target sampai dengan triwulan II sebesar Rp0,00 dan sebesar 153,74% dari target Tahun 2021 sebesar Rp59.000.000,00.

2) Sasaran Program 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional.

a) IKK 2.1: Jumlah Program Prioritas yang Tercapai sesuai Target

IKK Jumlah Program Prioritas yang Tercapai sesuai Target Tahun 2021 ditargetkan sebesar 2 PP, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 0 PP. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 23 PP.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Program Prioritas yang Tercapai sesuai Target" sebesar tak terhingga dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0 PP dan tercapai 1.150,00% dari target Tahun 2021 sebesar 2 PP.

b) IKK 2.2: Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi

IKK Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi diukur dengan menghitung jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang telah dilakukan pengawasan dan ditargetkan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan. Target IKK Tahun 2021 sebesar 7 KP, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 0 KP. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 4 KP.

Dengan demikian capaian IKK " Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi" sebesar tak terhingga dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0 KP dan tercapai 57,14% dari target Tahun 2021 sebesar 7 KP.

c) IKK 2.3: Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai sesuai Target

IKK Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai sesuai Target diukur dengan menghitung jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang telah dilakukan pengawasan dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sebesar 7 KP, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 0 KP. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 2 KP.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai sesuai Target" sebesar tak terhingga dari target sampai dengan triwulan II sebesar 0 KP dan tercapai 28,57% dari target Tahun 2021 sebesar 7 KP.

d) IKK 2.4: Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai sesuai Target

IKK Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai Target diukur dengan melakukan reviu tata kelola atas pembangunan proyek strategis nasional. Target kinerja IKK ini pada tahun 2021 sebesar 3 PSN, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 3 PSN. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 8 PSN.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai sesuai Target" sebesar 266,67% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 3 PSN dan dari target Tahun 2021 sebesar 8 PSN.

e) IKK 2.5: Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang Tercapai sesuai Target

Target IKK Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang Tercapai sesuai Target pada tahun 2021 sebesar 1 Program Prioritas (PP), sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 0 PP. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0 PP.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai sesuai Target" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 0 KP dan tercapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar 1 PP.

f) IKK 2.6: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik

Target IKK Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik Tahun 2021 sebesar 16.67%, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 0,00% dan tercapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar 16,67%.

g) IKK 2.7: Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

Target IKK Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan Tahun 2021 sebesar 80,00%, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 0,00% dan tercapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar 80,00%.

3) Sasaran Program 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha.

a) IKK 3.1: Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

IKK Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik diukur dengan pelaksanaan asesmen penerapan tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada BUMN. Target kinerja ini Tahun 2021 sama dengan target sampai dengan triwulan II sebanyak 3 BUMN. Realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 4 BUMN.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik" sebesar 133,33% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebanyak 3 BUMN.

b) IKK 3.2: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKK Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat diukur dengan melakukan evaluasi kinerja BUMD aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan administrasi. Target kinerja ini pada tahun 2021 ditetapkan sejumlah 35 (tiga puluh lima) BUMD, sedangkan target sampai dengan triwulan II sebanyak 30 (tiga puluh) BUMD. Realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 38 (tiga puluh delapan) BUMD.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat" sebesar 126,67% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 30 BUMD dan tercapai 108,57% dari target Tahun 2021 sebesar 35 BUMD.

c) IKK 3.3: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

IKK Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat diukur dengan melakukan evaluasi kinerja BLUD meliputi aspek keuangan, aspek pelayanan, dan aspek mutu dan manfaat kepada masyarakat. Target kinerja ini pada tahun 2021 ditetapkan sejumlah 7 BLUD. Realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 1 BLUD.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" sebesar 33,33% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 3 BLUD dan tercapai 14,29% dari target Tahun 2021 sebesar 7 BLUD.

Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan target dari Rendal Deputi AN.

d) IKK 3.4: Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

IKK Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan diukur dengan pendataan/monitoring jumlah BUMDes yang telah mampu menyusun laporan keuangan. Target kinerja ini pada tahun 2021 ditetapkan sejumlah 272 BUMDes. Realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 0 BUMDes.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 120 BUMDes dan tercapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar 272 BUMDes.

Tidak terealisirnya IKK ini karena adanya refocusing dana di Kabupaten/Kota, sehingga biaya penyelenggaraan Bimtek BUMDes di Kabupaten/Kota dibatalkan Rendal Deputi AN.

4) Sasaran Program 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.

a) IKK 4.1: Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

IKK Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti diukur dengan membandingkan jumlah hasil pengawasan

represif yang telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh mitra kerja terhadap jumlah penugasan pengawasan represif. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 0,00% dan dari target Tahun 2021 sebesar 100,00%.

b) IKK 4.2: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

IKK Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti diukur dengan membandingkan jumlah hasil pengawasan preventif dan edukatif yang telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh mitra kerja terhadap jumlah penugasan pengawasan preventif dan edukatif. Target kinerja pada tahun 2021 sebesar 75%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0,00%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0,00% dan tercapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar 75,00%.

5) Sasaran Program 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.

a) IKK 5.1: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

IKK Jumlah APIP Pemerintah Daerah dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai Kapabilitas APIP \geq Level 3 berdasarkan hasil ekspose dan surat pengantar (SP) laporan hasil penjaminan kualitas kapabilitas APIP level 3 dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Target kinerja tahun 2020 sejumlah 12 (dua belas) APIP. Realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 11 (sebelas) APIP.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" sebesar 100,00% dari target sampai dengan

triwulan II sebanyak 11 APIP dan sebesar 91,67% dari target Tahun 2021 sebanyak 12 APIP.

b) IKK 5.2: Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

IKK Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai Maturitas SPIP \geq Level 3 berdasarkan hasil ekspose dan penetapan dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 31 Pemda.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" sebesar 91,18% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 31 Pemda dan dari target Tahun 2021 sebesar 34 Pemda.

c) IKK 5.3: Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3

IKK Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai MRI \geq Level 3. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0 Pemda.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0 Pemda dan dari target Tahun 2021 sebesar 1 Pemda.

d) IKK 5.4: Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKK Pemerintah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan memenuhi karakteristik level 3. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan

II sebanyak 0 Pemda dan dari target Tahun 2021 sebesar 3 (tiga) Pemda.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0 Pemda dan dari target Tahun 2021 sebesar 3 (tiga) Pemda.

- e) IKK 5.5: Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

IKK Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah diukur dengan menghitung persentase jumlah pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini WTP pada LKPD dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan jumlah seluruh pemerintah daerah di Indonesia, yaitu sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua). Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 4,61% dari Pemerintah Daerah seluruh Indonesia atau sebanyak 25 Pemerintah Daerah. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 25 Pemda.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah" sebesar tak terhingga dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0 Pemda dan sebesar 100% dari target Tahun 2021 sebesar 25 Pemda.

- f) IKK 5.6: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

IKK Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) diukur dengan menghitung adanya rekomendasi strategis yang disampaikan Perwakilan BPKP Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah melalui Laporan Hasil Pengawasan. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 1 Rekomendasi Strategis. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 1 Rekomendasi.

Dengan demikian capaian IKK "Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota" sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 1 Rekomendasi.

g) IKK 5.7: Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

IKK Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan total desa di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 7.724 desa. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 50% atau 3.867 desa. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 71,44% atau sebanyak 5.518 desa.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa" sebesar 142,88% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 71,44% atau sebanyak 5.518 desa.

h) IKK 5.8: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

IKK Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai diukur dengan menghitung jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 195 desa di Provinsi Jawa Timur. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0 desa.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0 desa dan dari target Tahun 2021 sebesar 195 desa.

i) IKK 5.9: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

IKK Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes diukur dengan menghitung banyaknya APIP yang telah menerapkan aplikasi Siswaskeudes sebagai alat untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) APIP. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 12 APIP.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes" sebesar tak terhingga dari target sampai dengan triwulan

II sebanyak 0 APIP dan sebesar 150,00% dari target Tahun 2021 sebesar 8 (delapan) APIP.

j) IKK 5.10: Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3

IKK Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah BUMN di Provinsi Jawa Timur yang telah mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan memenuhi karakteristik level 3. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 1 (satu) BUMN di Provinsi Jawa Timur. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0 BUMN.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 1 BUMN dan dari target Tahun 2021 sebesar 1 BUMN.

k) IKK 5.11: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

IKK Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah RSUD yang telah mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan memenuhi karakteristik level 3. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 6 (enam) RSUD di Provinsi Jawa Timur. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 0 RSUD.

Dengan demikian capaian IKK "Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 2 RSUD dan dari target Tahun 2021 sebesar 6 RSUD.

Tidak terealisirnya IKK ini disebabkan target IKK telah dihapus oleh Rendal Deputi Akuntan Negara.

6) Sasaran Program 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja.

a) IKK 6.1: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

IKK Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja diukur dengan kegiatan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 76. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 83,52.

Dengan demikian capaian IKK "Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja" sebesar tak terhingga dari target sampai dengan triwulan II sebanyak 0 dan sebesar 109,89% dari target Tahun 2021 sebesar 76.

b) IKK 6.2: Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi

IKK persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi diukur dengan diklat yang diikuti pegawai dan penyelenggaraan Program Pelatihan Mandiri/Pelatihan di Kantor Sendiri (PPM/PKS). Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 108,00%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi" sebesar 108,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 100% .

c) IKK 6.3: Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu

IKK persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan pengiriman Laporan Disiplin Pegawai (GDN) kepada Kepala BPKP secara tepat waktu yaitu maksimal tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 100%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi" sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 100%.

d) IKK 6.4: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

IKK Ketepatan Waktu Penyusunan RKA Unit Kerja diukur dengan memperhatikan ketepatan waktu penerbitan DIPA Satuan Kerja Tahun Anggaran 2022 yaitu tanggal Agustus 2021. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 100%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 100%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja" sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 100%.

e) IKK 6.5: Skor IKPA Unit Kerja

IKK IKPA Unit Kerja diukur dengan memperhatikan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 87. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 93,82%.

Dengan demikian capaian IKK "Skor IKPA Unit Kerja" sebesar 110,37% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 85% dan sebesar 107,83% dari target Tahun 2021 sebesar 87%.

f) IKK 6.6: Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu

IKK Ketepatan waktu penerbitan SPM diukur dengan indikator penyelesaian tagihan dan dispensasi SPM. Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut masing-masing adalah 100, artinya semua tagihan pihak ketiga dibayarkan secara tepat waktu dan tidak ada dispensasi untuk penundaan pembayaran kepada pihak ketiga. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 91,00%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 100,00%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu" sebesar 109,89% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 91,00%.

g) IKK 6.7: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

IKK Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP diukur dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan unit kerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 100,00%. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 100,00%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP" sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 100,00%.

h) IKK 6.8: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

IKK Pengelolaan BMN Unit Kerja diukur dengan penilaian mandiri atas kegiatan BMN di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 76 (Baik). Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 76 (Baik).

Dengan demikian capaian IKK "Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja" sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 76 (Baik).

i) IKK 6.9: Nilai SAKIP Unit Kerja

IKK Nilai SAKIP Unit Kerja diukur dengan melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sampai dengan saat evaluasi oleh Inspektorat BPKP. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 81. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 82,88.

Dengan demikian capaian IKK "Nilai SAKIP Unit Kerja" sebesar 102,32% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 81.

j) IKK 6.10: Maturitas SPIP Unit Kerja

IKK Maturitas SPIP Unit Kerja diukur dengan peningkatan maturitas SPIP yang tertuang dalam Laporan Peningkatan Maturitas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2020. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar Level 3. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 3,925.

Dengan demikian capaian IKK "Maturitas SPIP Unit Kerja" sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 3.

k) IKK 6.11: Indeks MR Unit Kerja

IKK Indeks MR Unit Kerja diukur dengan Implementasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur terhadap MR. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar Level 3. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 0.

Dengan demikian capaian IKK "Indeks MR Unit Kerja" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 3.

l) IKK 6.12: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja

IKK Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja diukur dengan pelaksanaan survei yang dilakukan dengan mengedarkan kuesioner secara *online* melalui *google form* dan hasil survei tertuang dalam Laporan Survei Kepuasan Pegawai atas Layanan Bagian Tata Usaha di Lingkungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 76. Realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Tahun 2021 sebesar 0.

Dengan demikian capaian IKK "Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 76.

m) IKK 6.13: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

IKK Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja diukur dengan melakukan survei pelaksanaan pelayanan publik pada mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 73. Indeks kepuasan layanan unit kerja telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2021 dengan responden sebanyak 30 mitra kerja. Jawaban kuesioner diolah oleh Inspektorat BPKP dengan hasil capaian sebesar 88,51

Dengan demikian capaian IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja" sebesar 121,25% dari target sampai dengan triwulan II dan dari target Tahun 2021 sebesar 73.

Capaian *outcome* secara rinci terdapat dalam lampiran 1.

Capaian Kinerja *outcome* aplikasi e-SAKIP belum mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga belum semua indikator kinerja program bisa diinput. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim e-SAKIP dari Biro MKOT.

b. Capaian realisasi *output*

Capaian realisasi *output* sesuai dengan laporan TEPRAsampai dengan bulan Juni 2021, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Dukungan Manajemen (Kode Program 3676)

Kode *program* 3676 (pelaksanaan dukungan manajemen) terdiri atas 3 kegiatan dengan realisasi sebesar 100,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 100,00% dari target setahun untuk kegiatan 3676.EAA dan 3676 EAC serta 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun untuk kegiatan 3676.EAD, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kode *kegiatan* 3676.EAA (layanan perkantoran) sebesar 100,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 100,00% dari target setahun yaitu sebanyak 1 layanan yang direalisasikan di awal tahun, terdiri atas 2 subkegiatan, yaitu:

(1) Kode *subkegiatan* 3676.EAA.213.001 (layanan perkantoran gaji dan tunjangan) sebesar 100,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 100,00% dari target setahun yaitu sebanyak 1 layanan yang direalisasikan di awal tahun; dan

(2) Kode *subkegiatan* 3676.EAA.213.002 (layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar 100,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 100,00% dari target setahun yaitu sebanyak 1 layanan yang direalisasikan di awal tahun.

b) Kode *kegiatan* 3676.EAC (layanan umum) sebesar 100,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 100,00% dari target setahun, yaitu sebanyak 2 layanan yang direalisasikan di awal tahun, terdiri atas 2 subkegiatan, yaitu:

(1) Kode *subkegiatan* 3676.EAC.213.TU1 (layanan perencanaan, keuangan, SDM, komunikasi dan umum) sebesar 100,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 100,00% dari target setahun yaitu sebanyak 1 layanan yang direalisasikan di awal tahun; dan

(2) Kode *subkegiatan* 3676.EAC.213.TU2 (layanan penyelenggaraan SPIP dan RB) sebesar 100,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 100,00% dari target setahun yaitu sebanyak 1 layanan yang direalisasikan di awal tahun.

c) Kode *kegiatan* 3676.EAD (layanan sarana internal) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun, yaitu sebanyak 9 unit, terdiri atas 1 subkegiatan, yaitu:
Kode *subkegiatan* 3676.EAD.213.SI (pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun.

2) Program Pengawasan Pembangunan (Kode Program 3701)

Kode *program* 3701 (pengawasan pembangunan) sebesar 771,43% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 22,09% dari target setahun, terdiri atas 3 kegiatan, yaitu:

a) Kode *kegiatan* 3701.FAG.591 (rekomendasi hasil pengawasan atas pembinaan JFA Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 66,67% dari target setahun, terdiri atas 1 subkegiatan, yaitu:

Kode *subkegiatan* 3701.FAG.591.513 (pengawasan atas pembinaan JFA Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 66,67% dari target setahun.

b) Kode *kegiatan* 3701.FAG.013 (pengawasan pembangunan, penambahan target) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,26% dari target setahun, terdiri atas 15 subkegiatan, yaitu:

(1) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.013.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 5,88% dari target setahun;

(2) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.047.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;

(3) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.081.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;

(4) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.115.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Polhukam PMK

Deputi Polhukam) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 25,00% dari target setahun;

- (5) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.149.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 27,78% dari target setahun;
- (6) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.183.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
- (7) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.217.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 13,64% dari target setahun;
- (8) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.251.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 17,24% dari target setahun;
- (9) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.285.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
- (10) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.353.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Akuntan Negara Deputi AN) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 88,68% dari target setahun;
- (11) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.387.313 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha Bidang Akuntan Negara Deputi AN) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
- (12) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.421.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Akuntan Negara Deputi AN) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;

- (13) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.455.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Investigasi Deputi Investigasi) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
 - (14) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.489.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Investigasi Deputi Investigasi) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun; dan
 - (15) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.523.413 (rekomendasi hasil pengawasan atas efektivitas pengendalian korupsi Bidang Investigasi Deputi Investigasi) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun.
- c) Kode *kegiatan* 3701.UAG.013 (pengawasan pembangunan) sebesar 285,71% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 37,74% dari target setahun, terdiri atas 16 subkegiatan, yaitu:
- (1) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.013.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang perekonomian dan kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 75,00% dari target setahun;
 - (2) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.047.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang perekonomian dan kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 80,95% dari target setahun;
 - (3) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.115.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
 - (4) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.149.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar 150,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 75,00% dari target setahun;
 - (5) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.183.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pengendalian intern bidang

polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;

- (6) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.217.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang PKD Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 40,00% dari target setahun;
- (7) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.251.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang PKD Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
- (8) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.285.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pengendalian intern bidang PKD Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 28,57% dari target setahun;
- (9) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.353.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang akuntan negara Deputi AN) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 57,14% dari target setahun;
- (10) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.387.313 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas badan usaha bidang akuntan negara Deputi AN) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 80,00% dari target setahun;
- (11) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.421.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pengendalian intern bidang akuntan negara Deputi AN) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 66,67% dari target setahun;
- (12) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.455.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang investigasi Deputi Investigasi) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
- (13) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.489.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang investigasi Deputi Investigasi) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;

- (14) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.523.413 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas efektifitas pengendalian korupsi Deputi Investigasi) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 0,00% dari target setahun;
- (15) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.625.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pembinaan kapabilitas APIP bidang PKD Deputi PKD) sebesar 0,00% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 66,67% dari target setahun; dan
- (16) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.659.613 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengawasan regional) sebesar 8,33% dari target sampai dengan bulan Juni 2021 dan 2,94% dari target setahun.

Capaian *output* secara rinci terdapat dalam lampiran 2.

Capaian output dari aplikasi e-SAKIP:

(1) ST Terbit

Capaian penerbitan ST sampai dengan bulan Juni 2021 terhadap rencana tahun 2021 sebanyak 133 ST dari target 395 ST (33,67%), dengan realisasi dana sebesar Rp414.717.255,00 dari target sebesar Rp7.378.631.548,00 (5,62%).

(2) Capaian penerbitan LHP sampai dengan bulan Juni 2021 terhadap rencana tahun 2021 sebanyak 77 LHP dari target 512 LHP (15,04%) dengan realisasi dana sebesar Rp414.717.255,00 dari target sebesar Rp10.854.543.210,00 (3,82%).

c. Capaian realisasi anggaran

Capaian realisasi anggaran untuk pemantauan pelaksanaan pembangunan (PP39/2006) sampai dengan bulan Juni 2021 sesuai dengan hasil input aplikasi e-monev Bappenas per tanggal 7 Juli 2021, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Dukungan Manajemen (Kode Program 3676)

Kode *program* 3676 (pelaksanaan dukungan manajemen) sebesar Rp23.331.040.529,00 atau 51,17% dari anggaran program tersebut, terdiri atas 3 kegiatan, yaitu:

a) Kode *kegiatan* 3676.EAA (layanan perkantoran) sebesar Rp23.079.610.138,00 atau 51,36% dari anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas 2 subkegiatan, yaitu:

- (1) Kode *subkegiatan* 3676.EAA.213.001 (layanan perkantoran gaji dan tunjangan) sebesar Rp21.281.938.205,00 atau 51,82% dari anggaran subkegiatan tersebut; dan
 - (2) Kode *subkegiatan* 3676.EAA.213.002 (layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp1.797.671.933,00 atau 46,44% dari anggaran subkegiatan tersebut.
- b) Kode *kegiatan* 3676.EAC (layanan umum) sebesar Rp251.430.391,00 atau 40,24% dari anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas 2 subkegiatan, yaitu:
- (1) Kode *subkegiatan* 3676.EAC.213.TU1 (layanan perencanaan, keuangan, SDM, komunikasi dan umum) sebesar Rp251.430.391,00 atau 40,24% dari anggaran subkegiatan tersebut; dan
 - (2) Kode *subkegiatan* 3676.EAC.213.TU2 (layanan penyelenggaraan SPIP dan RB) sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut.
- c) Kode *kegiatan* 3676.EAD (layanan sarana internal) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas 1 subkegiatan, yaitu:
Kode *subkegiatan* 3676.EAD.213 (pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut.

2) Program Pengawasan Pembangunan (3701)

Kode *program* 3701 (pengawasan pembangunan) sebesar Rp2.045.031.819,00 atau 17,95% dari anggaran program tersebut, terdiri atas 3 kegiatan, yaitu:

- a) Kode *kegiatan* 3701.FAG.591 (pengawasan pembangunan) sebesar Rp30.924.431,00 atau 59,47% dari anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas 1 subkegiatan, yaitu:

Kode *sub kegiatan* 3701.FAG.591.513 (pengawasan atas pembinaan JFA Deputi PKD) sebesar Rp30.924.431,00 atau 59,47% dari anggaran subkegiatan tersebut.

- b) Kode *kegiatan* 3701.FAG.013 (pengawasan pembangunan, penambahan target) sebesar Rp868.016.141,00 atau 8,95% dari anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas 15 sub kegiatan, yaitu:

- (1) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.013.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar Rp133.170.000,00 atau 27,98% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (2) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.047.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar Rp11.550.000,00 atau 1,05% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (3) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.081.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (4) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.115.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar Rp7.790.000,00 atau 4,23% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (5) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.149.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar Rp62.563.000.000,00 atau 14,82% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (6) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.183.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Polhukam PMK Deputi Polhukam) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (7) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.217.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Deputi PKD) sebesar Rp237.224.886,00 atau 8,87% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (8) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.251.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Deputi PKD) sebesar Rp135.876.000,00 atau 16,53% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (9) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.285.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah Deputi PKD) sebesar Rp9.590.000,00 atau 0,86% dari anggaran subkegiatan tersebut;

- (10) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.353.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Akuntan Negara Deputi AN) sebesar Rp253.818.255,00 atau 21,09% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (11) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.387.313 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha Bidang Akuntan Negara Deputi AN) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (12) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.421.513 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern Bidang Akuntan Negara Deputi AN) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (13) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.455.113 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Bidang Investigasi Deputi Investigasi) sebesar Rp16.434.000,00 atau 4,10% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (14) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.489.213 (rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pembangunan Bidang Investigasi Deputi Investigasi) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut; dan
- (15) Kode *subkegiatan* 3701.FAG.523.413 (rekomendasi hasil pengawasan atas efektifitas pengendalian korupsi Bidang Investigasi Deputi Investigasi) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut.

c) Kode *kegiatan* 3701.UAG.013 (pengawasan pembangunan) sebesar Rp1.146.091.247,00 atau 69,68% dari anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas 16 subkegiatan, yaitu:

- (1) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.013.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang perekonomian dan kemaritiman Deputi Perekonomian) sebesar Rp53.848.000,00 atau 73,72% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (2) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.047.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang perekonomian dan kemaritiman Deputi Perekonomian)

sebesar Rp229.672.671,00 atau 85,37% dari anggaran subkegiatan tersebut;

- (3) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.115.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang polhukam PMK Deputy Polhukam) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (4) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.149.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang polhukam PMK Deputy Polhukam) sebesar Rp77.402.000,00 atau 65,89% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (5) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.183.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pengendalian intern bidang polhukam PMK Deputy Polhukam) sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (6) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.217.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang PKD Deputy PKD) sebesar Rp40.693.000,00 atau 52,22% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (7) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.251.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang PKD Deputy PKD) sebesar Rp43.076.000,00 atau 74,13% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (8) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.285.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pengendalian intern bidang PKD Deputy PKD) sebesar Rp76.040.972,00 atau 84,75% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (9) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.353.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang akuntan negara Deputy AN) sebesar Rp40.067.065,00 atau 34,78% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (10) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.387.313 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas badan usaha bidang akuntan negara Deputy AN) sebesar Rp59.805.000,00 atau 75,40% dari anggaran subkegiatan tersebut;

- (11) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.421.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pengendalian intern bidang akuntan negara Deputi AN) sebesar Rp6.680.000,00 atau 11,13% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (12) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.455.113 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas keuangan bidang investigasi Deputi Investigasi) sebesar Rp66.213.500,00 atau 75,67% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (13) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.489.213 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas akuntabilitas pembangunan bidang investigasi Deputi Investigasi) sebesar Rp28.465.000,00 atau 76,71% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (14) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.523.413 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas efektifitas pengendalian korupsi Deputi Investigasi) sebesar Rp13.210.000,00 atau 76,28% dari anggaran subkegiatan tersebut;
- (15) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.625.513 (rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas pembinaan kapabilitas APIP bidang PKD Deputi PKD) sebesar Rp36.648.500,00 atau 73,34% dari anggaran subkegiatan tersebut; dan
- (16) Kode *subkegiatan* 3701.UAG.659.613 (rekomendasi hasil pengawasan atas pengawasan regional) sebesar Rp374.269.539,00 atau 74,98% dari anggaran subkegiatan tersebut.

Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana dan Pembangunan secara rinci terdapat dalam lampiran 3.

d. Monitoring Rencana Aksi Kinerja

Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor S-1427/PW13/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021, bahwa dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2021 maka perlu adanya Rencana Aksi Kinerja yang telah ditandatangani oleh masing-masing koordinator pengawasan bidang dan kepala bagian yang bertujuan untuk:

- 1) Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel guna mendukung pencapaian kinerja;

2) Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2021.

Monitoring Rencana Aksi sampai dengan triwulan II dilampirkan sebagai Matrik Rencana Aksi terdapat pada Lampiran 4.

5. Saran

Berdasarkan hasil monitoring tersebut, masih diperlukan konsistensi pengisian aplikasi SIMA oleh masing-masing bidang dari mulai proses perencanaan hingga pelaporan.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,



Sudarto
NIP 19620826 198303 1 001

No.	Indikator kinerja Program	Satuan	Target Tahun 2021	Target Per triwulan					Realisasi			Capaian (%)		
				Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV	Triw. I	Triw. II	Triw. III s.d. Triwulan Ini	Tahun 2021 s.d. Triwulan ini			
4.4	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	0									0	0,00%	0,00%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU													
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	12	10	1	1		10	11	11	11	11	91,67%	100,00%
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Pemda	34	34					31	31	31	31	91,18%	91,18%
5.3	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Pemprov	1			1			0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Pemda	3			3			0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.5	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	4,61			4,61			4,61	4,61	4,61	4,61	100,00%	~
5.6	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1	1					1	1	1	1	100,00%	100,00%
5.7	Persentase jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	50	50					71,44	71,44	71,44	71,44	142,88%	142,88%
5.8	Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	Desa	195		195				0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.9	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	8			8			12	12	12	12	150,00%	~
5.10	Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BUMD	0						0	0	0	0	0,00%	~
5.11	Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	6		2	2			0	0	0	0	0,00%	0,00%
5.12	Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	0											
5.13	Jumlah BUMD dengan Kapasitas Satuan Pengawasan	BUMD	0											
5.14	Jumlah BLUD dengan Kapasitas Satuan Pengawasan	BLUD	0											
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja													
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	76			76			83,52	83,52	83,52	83,52	109,89%	~
6.2	Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	100,00	100	100	100	100	117,00	99,00	108,00	108,00	108,00	108,00%	108,00%
6.3	Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja (bulan Agustus)	%	100,00						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	87	84	85	86	87	99,06	88,57	99,82	99,82	99,82	107,83%	110,37%
6.6	Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu	%	91,00	91	91	91	91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	109,89%	109,89%
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100,00	100	100	100	100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	B (Baik)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100,00%	100,00%
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81,00	81	81	81	81	82,88	82,88	82,88	82,88	82,88	102,32%	102,32%
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1 - 5	3	3	3	3	3	3,925	3,925	3,925	3,925	3,925	100,00%	100,00%
6.11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1 - 5	3						0	0	0	0	0,00%	0,00%
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor Skala 100	76,00		76	76	76	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00%	100,00%
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor Skala 100	73,00			73			89,51	89,51	89,51	89,51	121,25%	121,25%

TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2021	Target Bulanan												Realisasi Bulanan												Capaian Terhadap Target s.d. Bulan Juni (%)	Keterangan					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okst	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okst	Nov	Des			Jml s.d. Bulan Juni	Target Setahun (%)			
I	3676	3	Layanan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
		3676.EAA.213	Peleaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		3676.EAC.213	Layanan Perkontoran	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		3701	Layanan Umum	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
IV	3701	Pengawasan Pembangunan	Laporan	489	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	464	14	0	0	0	4	15	89	0	0	0	0	0	0	108	22,09	771,43		
		3701.FAG	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	66,67	0,00			
		3701.FAG.591.513	Pengawasan atas Pembinaan JFA (Deputi PKD-PSA)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	66,67	0,00		
		3701.FAG	Pengawasan Pembangunan (Penambahan Target)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	1	0,26	0,00			
		3701.FAG.013.113	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Deputi Perekonomian)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5,88	0,00		
		3701.FAG.047.213	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Deputi Perekonomian)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00		
		3701.FAG.081.513	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Deputi Perekonomian)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00		
		3701.FAG.115.113	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam (Deputi Polhukam)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	25,00	0,00		
		3701.FAG.149.213	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam (Deputi Polhukam)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	27,78	0,00		
		3701.FAG.183.513	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam (Deputi Polhukam)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00		
		3701.FAG.217.113	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi PKD)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	13,64	0,00		
		3701.FAG.251.213	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi PKD)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	17,24	0,00		
		3701.FAG.285.513	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi PKD)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00		
		3701.FAG.353.213	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara (Deputi AN)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47	88,68	0,00		
		3701.FAG.387.313	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara (Deputi AN)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00		
		3701.FAG.421.513	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara (Deputi AN)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00		

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2021	Target Bulanan												Realisasi Bulanan												Capaian Terhadap Target s.d. Bulan Juni (%)		Keterangan				
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml s.d. Bulan Juni	Jml s.d. Bulan Juni					
	3701.UAG.523.413	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (Deputi Invest)	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	3701.UAG.625.513	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APiP Bidang PKD (Deputi PKD-P3A)	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	3701.UAG.659.613	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional	Laporan	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,54	8,33		
		Sub Jumlah 3701	Laporan	489	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8,79	307,14		
		Layanan	Layanan	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		Laporan	Laporan	493	6	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21,91	600,80		
		TOTAL																																	

Sidoarjo, Juli 2021
Kepala Perwakilan

Alexander Rubi Satyoadi
NIP. 19650226 198603 1 001

LAPORAN HASIL

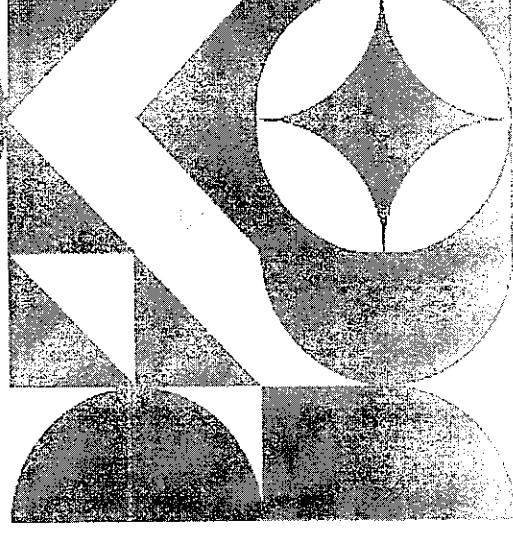
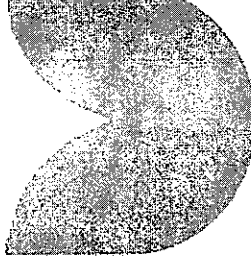
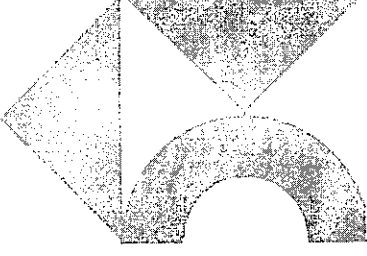
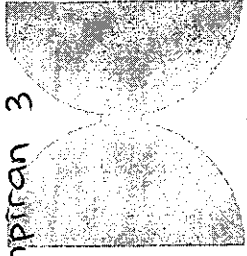
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

#450542

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

**JUNI
2021**



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
 Kementerian/Lembaga : 089 - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 Bulan : Juni (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			PERMASALAHAN			
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN		Kategori	Keterangan
					Realisasi	%		Status	Progres		
3676.EAA.213											
Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
1	3676.EAA.213.001 Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	41,070,320,000	21,281,938,205	51.82	1	Pelaksanaan	Dalam Proses Pelaksanaan	52.0 %	Tidak Ada Masalah
2	3676.EAA.213.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	3,870,900,000	1,797,671,933	46.44	1	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan	60.0 %	Tidak Ada Masalah
3676.EAC.213											
Layanan Dukman Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
3	3676.EAC.213.TUI Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	1	Layanan	624,820,000	251,430,391	40.24	1	Pelaksanaan	Dalam proses pelaksanaan	60.0 %	Tidak Ada Masalah
4	3676.EAC.213.TUZ Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB	1	Layanan	33,280,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan	60.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.013											
Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
5	3701.UAG.013.113 Pengawasan	4	Kegiatan	73,048,000	53,848,000	73.72	3	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	33.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.047											
Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN				PERMASALAHAN			
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN		Kategori	Keterangan	
					Realisasi	%		Status	Keterangan			Progres
6	3701.UAG.047.213 Pengawasan	21	Kegiatan	269,037,000	229,672,671	85.37	17	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	81.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.UAG.115 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
7	3701.UAG.115.113 Pengawasan	1	Kegiatan	4,389,000	0	0.00	0	Perencanaan	Dalam Tahap Perencanaan	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.UAG.149 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
8	3701.UAG.149.213 Pengawasan	4	Kegiatan	117,479,000	77,402,000	65.89	3	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	75.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.UAG.183 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
9	3701.UAG.183.513 Pengawasan	1	Kegiatan	9,510,000	0	0.00	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.UAG.217 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
10	3701.UAG.217.113 Pengawasan	5	Kegiatan	77,929,000	40,693,000	52.22	2	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.UAG.251 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
11	3701.UAG.251.213 Pengawasan	2	Kegiatan	58,107,000	43,076,000	74.13	0	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	66.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.UAG.285 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
12	3701.UAG.285.513 Pengawasan	7	Kegiatan	89,726,000	76,040,972	84.75	2	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	34.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN				PERMASALAHAN		
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN		Kategori	Keterangan
					Realisasi	%		Status	Progres		
3701.UAG.353 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
13	3701.UAG.353.213 Pengawasan	7	Kegiatan	115,197,000	40,067,065	34.78	4	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	57.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.387 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
14	3701.UAG.387.313 Pengawasan	5	Kegiatan	79,319,000	59,805,000	75.40	4	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	80.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.421 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
15	3701.UAG.421.513 Pengawasan	3	Kegiatan	60,000,000	6,680,000	11.13	2	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	66.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.455 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
16	3701.UAG.455.113 Pengawasan	6	Kegiatan	87,508,000	66,213,500	75.67	0	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	26.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.489 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
17	3701.UAG.489.213 Pengawasan	2	Kegiatan	37,109,000	28,465,000	76.71	0	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	26.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.523 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
18	3701.UAG.523.413 Pengawasan	1	Kegiatan	17,317,000	13,210,000	76.28	0	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	26.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.UAG.625 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN				STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					ANGGARAN		FISIK	Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan	
					Realisasi	%							
19	3701.UAG.625.513 Pengawasan	3	Kegiatan	49,972,000	36,648,500	73.34	2	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	66.0 %	Tidak Ada Masalah		
3701.UAG.659 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur													
20	3701.UAG.659.613 Pengawasan	34	Kegiatan	499,184,000	374,269,539	74.98	1	Pelaksanaan	Dalam tahap pelaksanaan.	26.0 %	Tidak Ada Masalah		
3701.FAG.013 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur													
21	3701.FAG.013.113 Pengawasan	17	Kegiatan	476,000,000	133,170,000	27.98	1	Pelaksanaan	Dalam proses penyelesaian Laporan	39.2 %	Tidak Ada Masalah		
3701.FAG.047 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur													
22	3701.FAG.047.213 Pengawasan	74	Kegiatan	1,095,460,000	11,550,000	1.05	0	Persiapan	nunggu perintah rendal	11.0 %	Tidak Ada Masalah		
3701.FAG.081 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur													
23	3701.FAG.081.513 Pengawasan	1	Kegiatan	35,100,000	0	0.00	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah		
3701.FAG.115 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur													
24	3701.FAG.115.113 Pengawasan	8	Kegiatan	184,150,000	7,790,000	4.23	2	Persiapan	Dalam tahap PERSIAPAN	25.0 %	Tidak Ada Masalah		
3701.FAG.149 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur													
25	3701.FAG.149.213 Pengawasan	18	Kegiatan	422,162,000	62,563,000	14.82	5	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	27.8 %	Tidak Ada Masalah		

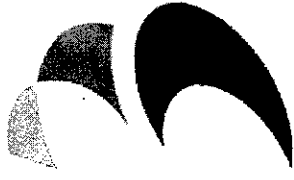
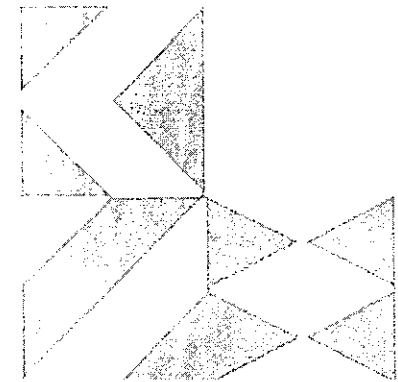
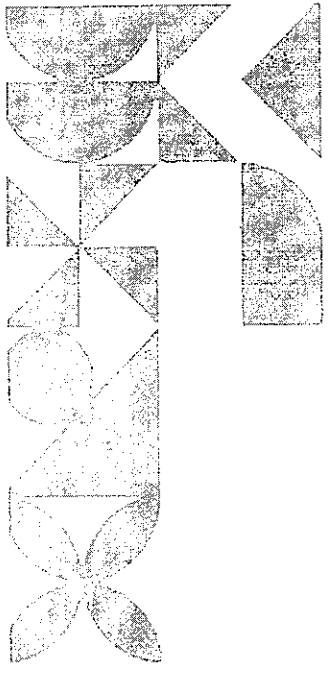
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN				PERMASALAHAN		
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN		Kategori	Keterangan
					Realisasi	%		Status	Progres		
3701.FAG.183 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
26	3701.FAG.183.513 Pengawasan	1	Kegiatan	25,340,000	0	0.00	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.FAG.217 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
27	3701.FAG.217.113 Pengawasan	44	Kegiatan	2,674,730,000	237,224,886	8.87	6	Persiapan	Dalam Tahap Persiapan	13.6 %	Tidak Ada Masalah
3701.FAG.251 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
28	3701.FAG.251.213 Pengawasan	29	Kegiatan	821,882,000	135,876,000	16.53	5	Persiapan	Dalam Tahap Persiapan	17.2 %	Tidak Ada Masalah
3701.FAG.285 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
29	3701.FAG.285.513 Pengawasan	61	Kegiatan	1,117,495,000	9,590,000	0.86	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.FAG.353 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
30	3701.FAG.353.213 Pengawasan	53	Kegiatan	1,203,780,000	253,818,255	21.09	47	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	88.7 %	Tidak Ada Masalah
3701.FAG.387 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											
31	3701.FAG.387.313 Pengawasan	37	Kegiatan	658,055,000	0	0.00	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah
3701.FAG.421 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur											

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN					PERMASALAHAN		
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN		Kategori	Keterangan	
					Realisasi	%		Status	Keterangan			
					Progres	Progres	Progres	Progres				
32	3701.FAG.421.513 Pengawasan	5	Kegiatan	83.660,000	0	0.00	10	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.FAG.455 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
33	3701.FAG.455.113 Pengawasan	14	Kegiatan	400,485,000	16,434,000	4.10	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.FAG.489 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
34	3701.FAG.489.213 Pengawasan	1	Kegiatan	39,065,000	0	0.00	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.FAG.523 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
35	3701.FAG.523.413 Pengawasan	17	Kegiatan	457,440,000	0	0.00	0	Perencanaan	Dalam tahap perencanaan.	10.0 %	Tidak Ada Masalah	
3701.FAG.591 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur												
36	3701.FAG.591.513 Pengawasan	3	Kegiatan	52,000,000	30,924,431	59.47	2	Pelaksanaan	Dalam Tahap Pelaksanaan	30.0 %	Tidak Ada Masalah	

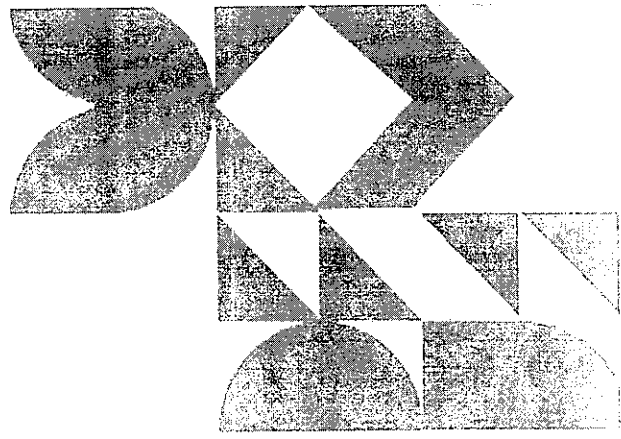
Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

[masih kosong]



**Kementerian PPN/
Bappenas**



**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

REALISASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				RISIKO UTAMA	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATU AN	TARGET KINERJA					
					TW1	TW2	TW3	TW4					TW1	TW2	TW3	TW4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BIDANG IPP 1 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Nasional	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	PP	2				2	Permasalahan pening/temuan signifikan tidak ditemukan saat penugasan assurance	Konwas Bidang IPP 1	PP	17.262.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
2	Audit Keuangan Program Pamsimas Kabupaten Mojokerto 2020 Loan IBRD-8575-ID								Permasalahan pening/temuan signifikan tidak ditemukan saat penugasan assurance	Konwas Bidang IPP 1	PP	17.262.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
3	Audit Keuangan Program Pamsimas Kabupaten Gresik 2020 Loan IBRD-8575-ID								Permasalahan pening/temuan signifikan tidak ditemukan saat penugasan assurance	Konwas Bidang IPP 1	PP	17.262.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
4	Audit Keuangan Program Pamsimas Provinsi Jawa Timur 2020 Loan IBRD-8575-ID								Permasalahan pening/temuan signifikan tidak ditemukan saat penugasan assurance	Konwas Bidang IPP 1	PP	17.262.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
5	Audit Pengelolaan Kegiatan Hibah Parwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada Kota Malang								Permasalahan pening/temuan signifikan tidak ditemukan saat penugasan assurance	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
6	Revisi Usulan Penggunaan Dana Cadangan Beras Pemerintah untuk Pelaksanaan KPSH Beras Medium Periode Oktober s.d. Desember 2020								Permasalahan pening/temuan signifikan tidak ditemukan saat penugasan assurance	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
7	Pengawasan atas Akuntabilitas Tata Kelola Program Prioritas								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
8	Pengawasan atas Belanja Negara (APBN) atas Aspek Belanja dan Pengeluaran/APBN								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
9	Revisi Tata Kelola PSN Triwulan I pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
10	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2021 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
11	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLB) Triwulan I Tahun 2021								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
12	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Jalan Tol Penambahan Lingkup Ngawi-Kertosono-Kediri Triwulan I Tahun 2021								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
13	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2021 pada Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru Kabupaten Kediri								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
14	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2021 pada Bendungan Tugu								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
15	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2021 pada Bendungan Samalok								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
16	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2021 pada Bendungan Bagong								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-
17	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2021 pada Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Surabaya dan Sidoarjo								Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	Konwas Bidang IPP 1	PP	12.000.000,00	Konwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				RISIKO UTAMA	KEGIATAN UTAMA	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATU AN	TARGET KINERJA				
					TW1	TW2	TW3	TW4						TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10									11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18									Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota Triwulan I Tahun 2021 pada Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	12.000.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
19									Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota Triwulan I Tahun 2021 pada Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	12.000.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
20									Revisi Tata Kelola PSN Sertifikasi Lahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	12.000.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
21									Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) TORA pada Kanwil BPN Jawa Timur Triwulan I Tahun 2021	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	12.000.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
22									Revisi Tata Kelola PSN Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan BTS serta Kawasan Selangkar Willis dan Lintas Selatan Triwulan I Tahun 2021	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	12.000.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
23									Revisi Tata Kelola PSN Proyek Double Track Jawa Selatan, Madiun-Jombang Triwulan I Tahun 2021	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	12.000.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
24									Revisi Tata Kelola PSN Proyek Double Track Jawa Selatan, Kedung Banteng-Madiun Triwulan I Tahun 2021	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	12.009.430,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
25									Revisi Tata Kelola PSN Proyek Double Track Jawa Selatan, Jombang-Mojokerto Triwulan I Tahun 2021	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	11.187.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP	1	-	-	-	-
26									Monitoring dan Evaluasi Bromo Tengger Semeru Triwulan II	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	13.680.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP		-	-	-	-
27									Monitoring dan Evaluasi Bromo Tengger Semeru Triwulan IV	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	13.680.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP		-	-	-	-
28									Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan Bendungan Tugu	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	13.680.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP		-	-	-	-
29									Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan Bendungan Bagong	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	13.680.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP		-	-	-	-
30									Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan Bendungan Semantok	Rekomendasi strategis yang diberikan tidak komprehensif/holistik	13.680.000,00	Korwas Bidang IPP 1	PP		-	-	-	-
JUMLAH											388.644.430,00			26	4	0	0	0

Sidoarjo, 15 April 2021
Korwas Bidang IPP 1

Joko Sutrisno
NIP. 19730427 199402 1 001

**REALISASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				ANGGARAN	RISIKO UTAMA	PIC	TARGET KINERJA				REALISASI	HAMBATAN TIDAK TERCAPAI
					TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4		
1	BIDANG IPP 2 Sasaran Kegiatan : Meningkatkannya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	KP	1	0	0	0	0	13.384.000	Korwas Bidang IPP 2	15	16	17	18	19	20	21
									15.000.000	Korwas Bidang IPP 2	0	1	0	0	0	1	
									15.149.000	Korwas Bidang IPP 2	0	1	0	0	0	1	
									36.000.000	Korwas Bidang IPP 2	0	1	0	0	0	1	
									30.000.000	Korwas Bidang IPP 2	0	0	0	1	0	0	
									15.790.000	Korwas Bidang IPP 2	0	0	0	1	0	1	
									15.790.000	Korwas Bidang IPP 2	0	0	0	1	0	1	
									25.419.412	Korwas Bidang IPP 2	0	1	0	0	0	0	
									13.600.000	Korwas Bidang IPP 2	0	0	0	0	1	0	
									13.600.000	Korwas Bidang IPP 2	0	0	0	0	1	0	
									193.732.412								
									JUMLAH								
												1	4	3	2	6	0

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021			TARGET KINERJA				REALISASI		No	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN			TW4	
				2021	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1 & TW2	TW1	TW2	TW3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		11. Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	1				1				6	Pengawasan atas Percepatan Pembangunan Program Strategis Kawasan Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru dalam rangka Pembangunan Ekonomi Regional.	Belum ditetapkan OPD leading sektor dan OPD penunjang	136.818.824	Korwas APD	PP			3	4	3
		12. Persentase Desa Yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	%	16,67				16,67			0,00	7	Pengawasan atas Penyaturan dan Penggunaan Dana Desa	Penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas	31.556.000	Korwas APD	PP	2				
3	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	24. Jumlah K/LP/Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Pemda	34				34			31	8	Workshop/Diseminasi/So sialisasi Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan MR	Pemerintah Provinsi Belum Menyusun Pedoman MR	23.808.000	Korwas APD	PP					1
		25. Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Penprov	1				1			0	9	Quality Assurance Hasil Penilaian Maturitas SPIP dan MR	Pemerintah Provinsi Belum Menyusun Pedoman MR	15.022.000	Korwas APD	PP					1
		26. Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Pemda	3				3			0											
		27. Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	4,61				4,61			4,61	10	Bimtek Implementasi SIMDA Next-G pada Perwakilan BPKP	Perubahan Aplikasi	12.237.000	Korwas APD	PP					1
		28. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1				1			1	12	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ APBD	Keterlambatan proses lelang	12.237.000	Korwas APD	PP	1				
		29. Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Desa	%	50				50			71,44	13	Kompliasi dan Analisis Ikhtisar Laporan Keuangan Desa dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan desa	14.934.000	Korwas APD	PP	1				

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				REALISASI TW1 & TW2	No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	TW5	TW6	TW7
					TW1	TW2	TW3	TW4														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		30. Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Desa	195			195		0	Peningkatan Kualitas pengelolaan aset desa	Belum dilakukan inventarisasi aset desa	15.657.000	Korwas APD	PP		1						
		31. Jumlah APiP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APiP	8			8		12	Siswaskeudes di Inspektorat												
										TOTAL		344.185.824			6	8	7	3				

Sidoarjo, 15 April 2021
Korwas Bidang APD 2

Korwas Bidang APD 1

Teguh Harjanto
NIP. 19650212 198503 1 001

Hartanto S Priyono
NIP. 19650124 198603 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021					TARGET KINERJA				ANGGARAN	PIC	SATU-AN	TW1	TW2	TW3	TW4	KETERANGAN	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9													
BIDANG AN																					
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	10. Jumlah PSN tercapai sesuai target	PSN	3										11.575.000	Joko Mulyono	PP	1	1			
2														10.500.000	Joko Mulyono	PP	1	1			
3														10.000.000	Joko Mulyono	PP	1	1			
4	2 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	14. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	3										17.849.000	Joko Mulyono	PP	1	1			Selain itu terdapat 2 kegiatan asesment GCG yaitu: 1. PT PJB (dana mitra) 2. PT PAL (sharing dana)
5		15. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0										15.000.000	Sugiharto	PP	1	1			

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATU-AN				KETERANGAN	
					TW1	TW2	TW3	TW4						TW1	TW2	TW3	TW4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		16. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	35					6	Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan PDAM A	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	15.872.000	Sugiharto	PP					Pada PKPT hanya ada 1 PP saja. Namun realisasinya adalah semua PDAM (38 PDAM) dievaluasi kinerjanya karena itu
		17. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7					7	Pengawasan terhadap Tata Kelola BLUD (Evkin) RSD A	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	16.470.000	Sugiharto	PP					Pada PKPT hanya ada 1 PP saja.
		18. Jumlah BUMDes yang	BUMDes	272					8	Pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDesa di kab/Kot/Prov A	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang	15.000.000	Sugiharto	PP					Pada PKPT hanya ada 1 PP saja.
3	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	32. Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	1															Terdapat asesmen maturitas MIR pada PT PAL dengan dana mitra
		33. Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BUMD	0					9	Pengawasan terhadap maturitas manajemen risiko pada PJT 1	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	20.000.000	Sugiharto	PP					
		34. Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	6					10	Pengawasan terhadap Maturitas Manajemen Risiko BLU/BLUD A	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	20.000.000	Sugiharto	PP					Pada PKPT hanya ada 1 PP saja.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATU-AN	TW1	TW2	TW3	TW4	KETERANGAN
					TW1	TW2	TW3	TW4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		35. Jumlah BUMD dengan Kapasitas Satuan Pengawasan	BUMD	0															
		36 Jumlah BLUD dengan Kapasitas Satuan Pengawasan	BLUD	0															
	TAMBAHAN																		
		Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	BPJS	1					11	Monitoring terhadap Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 pada BPJS Kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Timur	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	12.500.000	Joko Mulyono	BPJS		1			Ada di PKPT, tidak ada di Renja
		Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	BUMIN	1					12	Reviu atas Program Peningkatan Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada BUMIN Perkebunan	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	24.750.000	Joko Mulyono	PP		1		Ada di PKPT, tidak ada di Renja	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATU-AN	TW1	TW2	TW3	TW4	KETERANGAN
					TW1	TW2	TW3	TW4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	BUMD	1					13	Pengawasan Intern kegiatan prioritas layanan air minum perpipaan perkotaan yang layak aman pada Provinsi ...	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	20.000.000	Sugiharto	PP			1		Ada di PKPT, tidak ada di Renja
		Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	Dinkes	1					14	Monitoring Penyaluran Insentif dan Santunan Nakes TA 2020 pada Provinsi Jawa Timur	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	10.000.000	Sugiharto	PP	1				Ada di PKPT, tidak ada di Renja
		Persentase BU dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3	BUMD	1		1			15	Pengawasan terhadap Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern pada PJT 1	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	20.000.000	Sugiharto	PP		1			Ada di PKPT, tidak ada di Renja
									16	Pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDes dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada A	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	13.680.000	Sugiharto	PP				1	KF3
									17	Pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDes dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada B	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	13.680.000	Sugiharto	PP				1	KF3
									18	Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan atas Penerimaan Dana Pemerintah pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Perbankan	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	4.500.000	Joko Mulyono	PP			1		KF3

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATU-AN	TW1	TW2	TW3	TW4	KETERANGAN
					TW1	TW2	TW3	TW4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									19	Pengawasan atas Penempatan Dana Pemerintah pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Bank A	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	18.274.500	Joko Mulyono	PP				1	KF3
									20	Pengawasan atas Penempatan Dana Pemerintah pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Bank B	Keterbatasan tenaga karena harus merespon penugasan dalam waktu yang bersamaan	18.274.500	Joko Mulyono	PP				1	KF3
										TOTAL		307.925.000			1	13	2	4	

Sidoarjo, 15 April 2021
Korwas Bidang AN 2

Korwas Bidang AN 1

Joko Mulyono
NIP. 196608201992031001

Sugiharto
NIP. 196112161983021001

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATU AN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
3	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100				100	6	Pemberian Keterangan Ahli	Majelis hakim dan/atau Penasihat hukum terdakwa menolak ahli dari BPKP untuk memberikan keterangan ahli.	9.060.000	Afandi Charles	Lap	1	1		
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	75		70		5%	7	Fraud Control Plan	1. Fraud Control Plan (FCP) gagal diterapkan 2. Fraud Control Plan (FCP) sudah diterapkan tetapi gagal mendeteksi kecurangan.	13.360.000	Afandi	Lap			1	
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	0				-	8	Lainnya (KF3)	1. Keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi (sedang) 2. Risiko hasil dukungan KF 1 tidak sesuai dengan pedoman	71.850.000	Afandi Charles	Lap			2	3
		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	BU	0														
											196.343.412		-	2	3	5	4	

Sidoarjo, 15 April 2021
Korwas Bidang Investigasi 2

Sidoarjo, 15 April 2021
Korwas Bidang Investigasi 1

Charles Rante Batara
NIP. 19620308 198703 1 001

Afandi
NIP. 19660509 198803 1 001

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN Rp. Ribuan	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	REALISASI		HAMBATAN TIDAK TERCAPI
						TW1	TW2	TW3	TW4									TW1	TW2	
1	BIDANG P3A	3		5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/IBU	1	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	12	10	1	0	1	1. Rendahnya komitmen Pimpinan APIP dan Daerah. 2. Rendahnya kompetensi SDM APIP sehingga tidak mampu memenuhi KPA kapabilitas APIP Level 3	18.118	Korwas P3A	pp	1	-	-	-	1	-	-
		2	Bimbingan Teknis PK APIP Level 3 pada Inspektorat Kab Lamongan dan Inspektorat Kab Sampang								8.550	Korwas P3A	pp	1	-	-	-	1	-	-
		3	Bimbingan Teknis PK APIP Level 3 pada Inspektorat Kab Blitar								7.050	Korwas P3A	pp	1	-	-	-	1	-	-
		4	Penjaminan Kualitas PK APIP Level 3 pada Inspektorat Kab Gresik								15.462	Korwas P3A	pp	-	1	-	-	-	1	-
		B	Penjaminan Kualitas PK APIP Level 3 pada Pemda A																	
		B	Pembinaan JFA:																	
		5	Bimbingan Teknis Sibijak pada Inspektorat Kota Batu							Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan	15.204	Korwas P3A	pp	1	-	-	-	1	-	-
		6	Bimbingan Penerapan JFA pada Pemda B								15.884	Korwas P3A	pp	-	1	-	-	-	1	-
		7	Evaluasi penerapan JFA pada Pemda C							Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder.	15.884	Korwas P3A	pp	-	1	-	-	-	-	-
		8	Pengumpulan Data dan Informasi Bahan Audit Kinerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur								8.010	Korwas P3A	pp	1	-	-	-	-	1	-
		9	Audit Kinerja atas Program Strategis Pemda B								15.573	Korwas P3A	pp	-	1	-	-	-	-	1
		10	Audit Kinerja atas Program Strategis Pemda C								15.573	Korwas P3A	pp	-	1	-	-	-	-	1
		11	Pengawasan Program Strategis Regional Percepatan Pembangunan Ekonomi Regional di Jawa Timur							Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance	15.573	Korwas P3A	pp	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL										150.850			5	6	-	-	5			

Sidoarjo, 30 Juli 2021
Korwas Bidang P3A

Sudarto
NIP. 19620826 198303 1
001

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TWA				
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BIDANG TATA USAHA																			
1 Meningkatkan Kualitas Layanan Ketatausahaan																			
		Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	76	-	-	-	76	1	Pencapaian dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Rencana kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK tidak terlaksana.	16.640.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	1	1	1	1	
		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	-	-	-	100	2	Pendidikan dan Pelatihan Mandiri	Rencana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mandiri tidak terlaksana.	54.330.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	2	2	2	2	
		Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	3	Pengurusan administrasi presensi kepegawaian	Pegawai terlambat menyampaikan dokumen kepegawaian untuk diproses oleh subbagian kepegawaian.	21.660.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	3	3	3	3	
		Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	-	-	-	100	4	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Target output kegiatan pengawasan terlambat disampaikan oleh Rendal.	44.100.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	-	-	-	-	
		Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	87	84	85	86	87	5	Pengelolaan Anggaran	Rencana penyerapan anggaran perjalanan dinas pengawasan tidak tercapai.	6.000.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	3	3	3	3	
		Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	91	91	91	91	91	6	Penyusunan SPM	Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana terlambat diterima oleh subbagian keuangan.	83.330.000	Kabag Tata Usaha	SPM yang terbit tepat waktu	43	47	80	80	
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100	-	100	-	100	7	Penyusunan laporan keuangan	Realisasi penggunaan dana anggaran belanja barang Covid-19 tidak diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan.	28.660.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	-	1	-	1	
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	Baik	-	Baik	-	Baik	8	Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	Penomoran barang inventaris kantor belum dilakukan secara terbit dan Kartu Inventaris Ruangan belum diupdate.	148.720.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	-	1	-	1	
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai	81	-	-	-	81	9	Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPKP	Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja terlambat disusun	0	Kabag Tata Usaha	Laporan	-	-	-	-	
		Maturitas SPP Unit Kerja	Level	3	3	3	3	3	10	Penilaian SPIP	Rencana Tindak Pengendalian tidak terlaksana	8.320.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	1	1	1	1	
		Indeks MIR Unit Kerja	Indeks	3	-	-	-	3	11	Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	Rencana Tindak Pengendalian tidak terlaksana	8.320.000	Kabag Tata Usaha	Laporan	1	1	1	1	
		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks	76	-	76	-	76	12	Survei Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bagian Tata Usaha	Kebutuhan dan harapan pegawai atas pelayanan Bagian Tata Usaha belum dapat dipenuhi.	0	Kabag Tata Usaha	Laporan	-	1	-	1	
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks	73	-	-	-	73	13	Survei Layanan Mitra Kerja	Pelayanan publik kepada mitra kerja belum dapat dipenuhi	0	Kabag Tata Usaha	Laporan	-	-	-	-	
												420.080.000							

Sidoarjo, Agustus 2021
Kepala Bagian Tata Usaha

Slamet Susanto
NIP. 19680627 198903 1 001